

**COLLABORATIVE GOVERNANCE  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR**

Dikky Primadana

NPP. 32.0520

*Asdaf Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur*

*Prodi Studi Kebijakan Publik*

Email: [dikkyprimadana123@gmail.com](mailto:dikkyprimadana123@gmail.com)

Dosen Pembimbing: Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** Waste has become a serious problem in several areas, one of which is in Blitar Regency. Waste in Blitar Regency tends to increase every year. The Blitar Regency Government has actually implemented collaborative governance in managing waste to reduce the amount of waste generated. However, the objectives of collaborative governance have not been achieved properly. **Purpose:** The objective of this study is to determine and analyze the implementation of collaborative governance in waste management in Blitar Regency. **Method:** This study uses a qualitative descriptive writing method. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. In writing this thesis, the main theory of collaborative governance according to Ansel & Gash (2007) is used, where there are four dimensions, namely initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. **Results:** The results of the study show that collaborative governance in waste management in Blitar Regency has been implemented by the Environmental Service, Village Government, Mr. Muryani as the private sector, and the Bank Sampah Community Self-Help Group. However, collaborative governance that has been implemented by stakeholders has not been optimal. Of the four dimensions according to the collaborative governance theory according to Ansel & Gash (2007), there is only one dimension that has been successfully implemented, namely the dimension of facilitative leadership. While the other three dimensions have not been successfully implemented, namely the dimensions of initial conditions, institutional design, and collaborative processes. In the first dimension, namely initial conditions, only one indicator has been successfully implemented, namely the imbalance of resources and knowledge. While the other two indicators have not been successfully implemented, namely incentives and constraints, and the history of cooperation. In the second dimension, namely institutional design, there are two indicators that have been successfully implemented, namely inclusive participation and process transparency. While one other indicator has not been successfully implemented, namely clear basic rules. Furthermore, in the third dimension, namely facilitative leadership. All indicators in it have been successfully implemented, namely adequate management of the collaboration process, management of the ability to implement technical credibility, and empowering collaboration to make credible and convincing decisions. In the last or fourth dimension, namely the collaborative process, there are three indicators that have been successfully

*implemented, namely building trust, commitment to the process, and shared understanding. However, there is one indicator that has not been successfully implemented, namely interim results. Conclusion: Based on the problems faced, it is necessary to optimize the implementation of collaborative governance in waste management in Blitar Regency. Recommendation: The Blitar Regency Government can create a regulation or regulation that can be used as a legal umbrella in the implementation of collaborative governance, improve the quality of communication between stakeholders, and consider providing incentives to stakeholders.*

**Keywords:** *Collaborative Governance, Waste Management, Waste*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Sampah telah menjadi permasalahan yang serius di beberapa daerah salah satunya di Kabupaten Blitar. Sampah di Kabupaten Blitar cenderung untuk mengalami peningkatan pertahunnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sejatinya telah menjalankan *collaborative governance* dalam mengelola sampah untuk mengurangi angka timbulan sampah. Namun tujuan daripada *collaborative governance* tidak tercapai dengan semestinya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawanacara, dan dokumentasi. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori utama *collaborative governance* menurut Ansel & Gash (2007) dimana terdapat empat dimensi yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang fasilitatif, dan proses kolaboratif. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa, Bapak Muryani selaku pihak swasta, dan Kelompok Swadaya Masyarakat Bank Sampah. Namun *collaborative governance* yang telah dilaksanakan oleh *stakeholder* berjalan belum optimal. Dari keempat dimensi menurut teori *collaborative governance* menurut Ansel & Gash (2007), hanya terdapat satu dimensi yang telah berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu dimensi kepemimpinan yang fasilitatif. Sedangkan tiga dimensi lainnya belum berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif. Pada dimensi pertama yakni kondisi awal, indikator yang berhasil dilaksanakan hanya satu yaitu ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan. Sedangkan dua indikator lainnya belum berhasil dilaksanakan, yaitu insentif dan kendala, serta sejarah kerjasama. Pada dimensi yang kedua yakni desain kelembagaan, ada dua indikator yang berhasil dilaksanakan yaitu partisipasi inklusif dan transparansi proses. Sedangkan satu indikator lainnya belum berhasil dilaksanakan, yakni aturan dasar yang jelas. Selanjutnya pada dimensi ketiga yaitu kepemimpinan yang fasilitatif. Semua indikator di dalamnya telah berhasil dilaksanakan, yaitu manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi, pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis, dan memberdayakan kolaborasi untuk membuat keputusan kredibel dan meyakinkan. Pada dimensi terakhir atau keempat yaitu proses kolaboratif, ada tiga indikator yang berhasil dilaksanakan yakni membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama. Namun ada satu indikator yang tidak berhasil dilaksanakan yakni hasil sementara. **Kesimpulan:** Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan adanya pengoptimalan pelaksanaan tata kelola kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar. **Saran:** Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dapat membuat sebuah regulasi atau peraturan yang dapat digunakan sebagai payung hukum dalam

pelaksanaan tata kelola kolaboratif, meningkatkan kualitas kominakasi antar *stakeholder*; serta mempertimbangkan pemberian insentif kepada *stakeholder*.

**Kata kunci:** *Collaborative Governance*, Pengelolaan Sampah, Sampah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sampah merupakan salah satu masalah utama lingkungan dan pembangunan yang mempengaruhi masyarakat di negara berkembang maupun maju (Daka, 2020). Sampah menjadi sebuah masalah pokok dibidang lingkungan yang sedang dihadapi oleh pemerintah (Hastuti et al., 2021). Masalah pengelolaan sampah di Indonesia semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dan urbanisasi yang tinggi. Indonesia menempati peringkat kelima sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia (Ahdiat, 2023). Total timbulan sampah di Negara Indonesia sendiri mencapai 38,7 juta ton pada tahun 2023 (SIPSN, 2024). Peningkatan jumlah sampah ini sangat terkait dengan jumlah penduduk yang pada tahun 2023 tercatat mencapai lebih dari 270 juta jiwa (BPS, 2023). Adapun Provinsi dengan timbulan sampah terbesar di Indonesia pada tahun 2023 adalah Provinsi Jawa Timur dengan timbulan sampah mencapai 6,1 juta ton/tahun (SIPSN,2024). Kabupaten Blitar, meskipun memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Timur, daerah tersebut juga menghadapi masalah yang serupa. Pada tahun 2023, Kabupaten Blitar menghasilkan sekitar 150.990 ton sampah, yang setara dengan 413 ton sampah per hari (SIPSN, 2024). Angka ini menunjukkan betapa signifikan permasalahan sampah yang dihadapi daerah ini. Timbulan sampah yang tidak diatur dengan baik berpotensi menciptakan dampak destruktif, termasuk gangguan kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, risiko bencana banjir, dan pencemaran udara (Reno, 2015). Oleh karena itu, dibutuhkan peran dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Blitar.

Tugas pemerintah adalah untuk menyelesaikan masalah publik, *public service*, dan *civil service* (Labolo, 2017). Sejatinya Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi timbulan sampah, salah satunya adalah melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 39 Tahun 2018 yang menargetkan pengurangan timbulan sampah sebesar 30% pada tahun 2025 dan juga dengan menyelenggarakan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah. *Collaborative governance* dianggap dapat meningkatkan efektivitas dan peluang keberhasilan dalam menyelesaikan masalah publik (Abdulai et al., 2024). Istilah “*Collaborative Governance*” mulai populer sejak awal tahun sembilan puluhan dan saat ini dianggap sebagai konsep yang sangat penting dalam upaya negara-negara untuk mencapai pemerintahan yang demokratis (Sulaiman, 2024). Menurut (Emerson & Nabachi, 2015) *collaborative governance* dalam rangka mencapai tujuan-tujuan publik yang tidak akan terwujud jika hanya satu pihak saja yang mengimplementasikan keputusan kebijakan publik. Dengan adanya *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah diharapkan mampu menekan angka timbulan sampah di Kabupaten Blitar. Namun, pencapaian tersebut masih jauh dari harapan, dengan hanya sekitar 38% dari total sampah yang dapat dikelola dengan baik

pada tahun 2023 (SIPSN, 2024). Sementara itu, timbunan sampah di Kabupaten Blitar terus mengalami peningkatan, dengan kenaikan sebesar 0,9% pada tahun 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan dasar hukum bagi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, yang mengharuskan setiap pihak-baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta untuk bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah daerah diamanatkan untuk memfasilitasi pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah melalui kebijakan yang terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar sangat penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana *collaborative governance* dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Dalam kajian terkait pengelolaan sampah di Indonesia, berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Namun, sebagian besar penelitian tersebut cenderung berfokus pada tingkat kebijakan dan implementasi secara umum, tanpa mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor spesifik yang mendukung atau menghambat penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di daerah-daerah tertentu. Sebagai contoh, penelitian oleh Adianto & Prayuda (2018) dan Anjani (2022) menunjukkan pentingnya kolaborasi sektor publik dan swasta, namun tidak menguraikan secara rinci tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam membangun sinergi dengan masyarakat di tingkat lokal, seperti yang terjadi di Kabupaten Blitar. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai peran stakeholders lokal dalam pengelolaan sampah.

Selain itu, meskipun ada peraturan perundang-undangan yang mendasari pengelolaan sampah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah masih terhambat oleh berbagai kendala, baik dari segi infrastruktur, anggaran, maupun partisipasi masyarakat. Penelitian yang ada umumnya belum mengkaji bagaimana kebijakan ini diterapkan secara efektif di Kabupaten Blitar, yang dihadapkan pada jumlah timbunan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari SIPSN (2023), Kabupaten Blitar mengalami lonjakan timbunan sampah sebesar 0,9% pada tahun 2023, yang menunjukkan kurangnya efektivitas kebijakan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang fokus pada penerapan *collaborative governance* sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di daerah ini.

Lebih lanjut, meskipun banyak penelitian yang telah membahas *collaborative governance* dalam konteks pengelolaan sampah di kota-kota besar seperti Surabaya dan Bekasi, sedikit penelitian yang mengkaji penerapan model ini di daerah yang lebih kecil dan memiliki tantangan berbeda, seperti Kabupaten Blitar. Kabupaten ini memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara pengelolaan sampah, termasuk jumlah penduduk yang lebih kecil dan sumber daya yang terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya penelitian yang lebih terfokus pada penerapan *collaborative governance* dalam konteks yang lebih spesifik dan lokal,

yang mencakup analisis terhadap faktor-faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah. Penelitian pertama oleh (Adianto & Prayuda, 2018) berjudul *Collaborative Governance Dalam Kebijakan Lingkungan (Studi Kasus Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu)* menemukan bahwa terjadinya tata kelola kolaboratif dengan baik antara pemerintah dengan pihak swasta, serta program pengelolaan lingkungan juga turut berperan aktif dalam mengurangi masalah sampah. Penelitian kedua oleh (Anjani, 2022) berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat* menemukan bahwa proses tata kelola kolaboratif berjalan tidak efektif, serta kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya tidak baik. Penelitian ketiga oleh (Handoko et al., 2019) berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak Di Kota Pekanbaru*. Penelitian ini menemukan bahwa perlu peningkatan keterlibatan *stakeholder* kearah yang lebih baik, serta rekomendasi dari peneliti untuk membentuk strategi dalam tata kelola lingkungan yang lebih optimal. Penelitian keempat oleh (Ulfaida et al., 2024) berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Antri Kota Cimahi* menemukan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah Di Pasar Antri Kota Cimahi belum terlaksana dengan baik. Ada faktor penghambat dalam pelaksanaannya yakni adanya rasa saling tidak percaya antara pihak pemerintah dengan pihak swasta. Penelitian kelima oleh (Safitri et al., 2021) berjudul *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Bank Sampah Sejahtera Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)* menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif pada bank sampah mengalami beberapa hambatan yakni kurangnya dana operasional, serta klasifikasi limbah yang belum sesuai.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yakni lokus penelitian, fokus penelitian, serta data primer dan sekunder yang didapatkan. Penelitian ini dilakukan di lokus yang berbeda dengan kelima penelitian sebelumnya yakni di Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan teori Ansel & Gash (2007) untuk memecahkan permasalahan di lapangan dengan empat dimensi yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang fasilitatif, serta proses kolaboratif.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tata kelola kolaboratif sampah di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.

## **II. METODE**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini menggunakan pendekatan kualitatif serta dengan menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami lebih dalam terkait fenomena yang dihadapi oleh objek penelitian yang dilakukan secara keseluruhan dengan cara

menggambarkannya dalam bentuk kata-kata dalam suatu konteks alamiah serta dengan memanfaatkan metode-metode ilmiah (Mulyadi, 2019). Penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat *emergent*, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami (Simangunsong, 2017). Data yang didapatkan oleh penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang diharapkan mampu menyampaikan data yang dibutuhkan secara jelas (Rijali, 2018). Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Soegiyono, 2013). Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teori dalam membantu penulis untuk menganalisis *collaborative governance*. Teori yang digunakan adalah teori Ansel & Gash (2007) yang di dalamnya terdapat empat dimensi yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang fasilitatif, dan proses kolaboratif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yang penulis lakukan ditujukan untuk menjawab terkait dengan rumusan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar, serta apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tata kelola kolaboratif tersebut.

#### 3.1. Kondisi Awal

Kondisi awal berpengaruh dalam tata kolaborasi antara pemerintah dengan pihak lainnya. Kondisi awal ini dapat mempengaruhi yakni dapat memfasilitasi atau menghambat terjadinya kolaborasi (Ansel & Gash, 2007).

##### a) Ketidakseimbangan Sumber Daya dan Pengetahuan

Terjadinya *collaborative governance* diawali dengan adanya ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan pelaku tata kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan bahwasannya dalam pengelolaan dan pengurangan sampah di Kabupaten Blitar terdapat perbedaan kekuasaan dari tiap-tiap pemangku kepentingan sehingga perlu mengupayakan keterlibatan dari berbagai *stakeholder* tersebut agar tercipta suatu tujuan yakni Kabupaten Blitar yang bersih dari sampah. Indikator ini telah berjalan dengan baik karena masing-masing *stakeholder* memiliki tugas dan perannya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya masing-masing.

##### b) Insentif dan Kendala

Insentif dan kendala menjadi salah satu hal yang penting dalam *collaborative governance*. Insentif digunakan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi aktif, kontribusi dan komitmen dalam mencapai tujuan bersama. Pada *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar, insentif memang belum diberikan kepada *stakeholder* lain, namun ada hal lain berupa penghargaan yang membuat *stakeholder* semangat dalam melaksanakan *collaborative governance*. Sedangkan kendala juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tata kolaboratif antar berbagai pihak khususnya dalam penanggulangan masalah sampah di Kabupaten Blitar.

Adapun kendala pada pelaksanaan tata kelola kolaboratif adalah kurangnya komunikasi dan perhatian dari DLH kepada pihak lain utamanya Bank Sampah.

**c) Sejarah Kerjasama**

Adanya riwayat konflik atau sejarah kerjasama antar pemangku kepentingan di masa lalu merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan suatu kolaborasi. Dalam pelaksanaan *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar, hanya pihak swasta yang belum memiliki riwayat kerjasama sebelumnya dengan pihak lainnya. Untuk pihak lainnya seperti pemerintah desa, bank sampah, dan masyarakat telah melaksanakan kerjasama dengan DLH sebelumnya seperti sosialisasi, desa wisata, dll.

### **3.2. Desain Kelembagaan**

Desain kelembagaan ini mengacu pada protokol dasar dan regulasi fundamental untuk kerja sama, yang memiliki peran vital dalam menegakkan legitimasi prosedural proses kolaboratif (Ansel & Gash, 2007).

**a) Partisipasi Inklusif**

Partisipasi yang inklusif berperan penting dalam memastikan keterlibatan efektif diantara beragam pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi. Dengan adanya desain kelembagaan yang inklusif, forum dapat menjamin keterlibatan seluruh aktor dari berbagai perangkat daerah untuk berkolaborasi dalam pencapaian tujuan bersama. Indikator ini telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Semua pihak berpartisipasi aktif dalam tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar. Terbukti dengan adanya 140 bank sampah yang aktif di Kabupaten Blitar, serta semangat dari pihak swasta dan juga masyarakat dalam mengelola sampah.

**b) Aturan Dasar Yang Jelas**

Desain kelembagaan dalam *collaborative governance* menitikberatkan pada aturan-aturan dasar yang mewujudkan legitimasi prosedural. Hal ini mengharuskan pemerintah berperan sebagai regulator yang proaktif dan transparan dalam menyusun regulasi, aturan, serta kebijakan. Dengan adanya legitimasi prosedural, tercipta kejelasan mengenai ketentuan yang mengatur interaksi antar aktor dalam kolaborasi. Dalam pelaksanaan *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar, ternyata belum terdapat regulasi atau peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi payung hukum atau dasar dalam pelaksanaan tata kelola kolaboratif.

**c) Transparansi Proses**

Transparansi proses menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan tata kolaborasi atau *collaborative governance*. Transparansi disini maksudnya adalah keterbukaan dan mudahnya akses oleh semua pihak dalam mengakses informasi atau data-data yang dibutuhkan. Dalam penyelenggaraan tata kolaborasi pemerintahan atau *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar, telah beredar *website* yang telah dirancang sedemikian rupa agar semua pihak mudah dalam mengakses informasi atau data-data pengelolaan sampah seluruh Indonesia. Dua *website* tersebut yaitu SIPSN.menlhk.go.id (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) dan SIBANKSAM (Sistem Informasi Bank Sampah).

### 3.3. Kepemimpinan Yang Fasilitatif

Kepemimpinan secara luas dilihat sebagai unsur penting dalam membawa pihak untuk mengarahkan mereka melalui tambalan kasar dari proses kolaboratif meskipun negosiasi tanpa bantuan terkadang dimungkinkan, literturnya sangat banyak menemukan bahwa kepemimpinan fasilitatif penting untuk menyatukan para pemangku kepentingan dan membuat mereka terlibat satu sama lain dalam semangat kolaboratif (Ansel & Gash, 2007).

#### a) Manajemen Yang Cukup Terhadap Proses Kolaborasi

Pada dasarnya, kepemimpinan fasilitatif merupakan gaya kepemimpinan yang efektif dalam mengelola setiap anggota tim yang terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam kolaborasi, dengan cara mendorong partisipasi aktif dan memfasilitasi dialog antar anggota tim untuk mewujudkan kolaborasi yang optimal. Penyelenggaraan *collaborative governance* penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar tidak terlepas dari adanya peran salah satu pihak yang dianggap mampu memajemen proses kolaborasi yang ada. Pada indikator ini telah berhasil dilaksanakan dengan pihak DLH selaku koordinator, pihak swasta, bank sampah, serta masyarakat selaku anggota.

#### b) Pengelolaan Kemampuan Melaksanakan Kredibilitas Teknis

Peran utama dari indikator ini yakni tentang bagaimana agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi tetap memiliki peran yang kredibel dalam menjalankan tugasnya. Dalam penyelenggaraan *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar telah dilakukannya pemberdayaan maupun peningkatan kompetensi *stakeholder* yakni dengan cara melalui Dinas Lingkungan Hidup memberikan sosialisasi maupun penyuluhan rutin tiap tahun kepada masyarakat yang dibantu dan didampingi oleh pemerintah desa di Kabupaten Blitar, serta melaksanakan studi banding antar desa.

#### c) Memberdayakan Kolaborasi Untuk Membuat Keputusan Kredibel Dan Meyakinkan

Penyelenggaraan *collaborative governance* pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar merupakan proses kerjasama yang melibatkan beberapa pihak sesuai dengan kemampuan dan tupoksinya masing-masing. Oleh karena itu, berdasarkan dimensi kepemimpinan yang fasilitatif memberikan wewenang dan kepercayaan terhadap pihak-pihak terkait dalam menentukan target maupun jumlah data yang akan diunggah. Indikator ini telah berhasil dilaksanakan karena *stakeholder* sepakat untuk tidak memberikan target terkait data yang akan diupload.

### 3.4. Proses Kolaboratif

Model-model proses pemerintahan kolaboratif terkadang menggambarkan kolaborasi sebagai berkembang secara bertahap. Dalam kolaboratif proses pihak yang menjalin kolaborasi harus membangun komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman dalam mencapai sebuah hasil. Proses adalah hal yang penting tahapan (Ansel & Gash, 2007).

#### a) Membangun Kepercayaan

Kepercayaan dianggap sebagai fondasi penting dalam kolaborasi. Terdapat *paradoks* dalam hubungan antara kolaborasi dan kepercayaan, yang berfungsi seperti pelumas dan perekat yang memfasilitasi serta menyatukan proses kolaborasi. Ketika para aktor berkolaborasi, melakukan pertukaran informasi dan pengetahuan, serta

memperlihatkan ketergantungan, tanggung jawab, dan kepercayaan satu sama lain, maka kepercayaan akan tumbuh dan berkembang, yang pada akhirnya mendorong keterbukaan masing-masing aktor dalam proses kolaborasi tersebut. Indikator ini telah berhasil dilaksanakan, terbukti dengan bertambahnya bank sampah aktif dari semula 112 pada tahun 2023 menjadi 140 pada tahun 2024. Selain itu, *stakeholder* merasa perlu untuk bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut yang menjadi bukti bahwa telah terbentuknya kepercayaan antar *stakeholder*.

**b) Komitmen Terhadap Proses**

Komitmen mengacu kepada dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan individu untuk bertahan sebagai anggota suatu organisasi (Sapitri, 2016). Penyelenggaraan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar yang melibatkan beberapa pihak merupakan kegiatan kerjasama dalam jangka panjang, oleh sebab itu dibutuhkan komitmen dari semua aktor yang terlibat agar penyelenggaraan *collaborative* ini berjalan dengan baik. Indikator ini telah berhasil dilaksanakan dengan baik karena semua pihak yang terkait sama-sama berkomitmen untuk mengurangi sampah di Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan kompetensinya masing-masing.

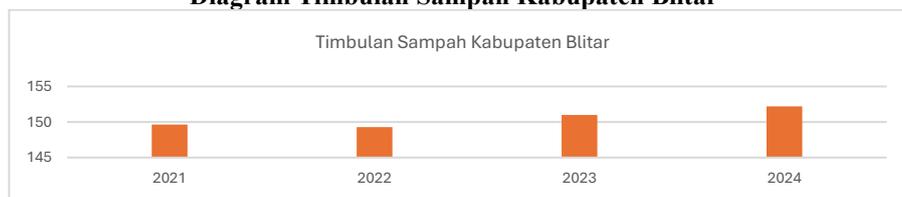
**c) Pemahaman Bersama**

Kolaborasi yang sehat memerlukan adanya peran pemangku kepentingan yang saling memahami dalam proses kolaborasinya terkait maksud dan tujuan kolaborasi serta peran dari masing-masing aktor yang terlibat. Dalam indikator pemahaman bersama ini dibutuhkan penyamaan persepsi oleh masing-masing aktor yang terlibat agar tercipta *collaborative governance* yang baik. Penyamaan persepsi ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar kepada masyarakat serta pendekatan khusus dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar kepada Bapak Muryani.

**d) Hasil Sementara**

Hasil capaian sementara mengacu pada prestasi yang diperoleh di pertengahan proses kolaborasi sebagai bukti bahwa kolaborasi tersebut telah berjalan. Hal ini kemudian menjadi tahapan penting menuju pencapaian tujuan akhir dengan menyediakan tolok ukur untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas tim kerja di masa mendatang. Indikator ini tidak berhasil dilaksanakan karena data menunjukkan terjadinya peningkatan timbulan sampah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, timbulan sampah di Kabupaten Blitar mencapai angka 149.305 kg/tahun. Pada tahun selanjutnya yakni 2023 mengalami kenaikan menjadi 150.99 kg/tahun. Puncaknya ada pada tahun 2024 dimana volume timbulan sampah naik mencapai angka 152.206 kg/tahun.

**Tabel 3. 1**  
**Diagram Timbulan Sampah Kabupaten Blitar**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

### 3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menjelaskan sejauh mana penerapan *Smart Governance* dalam konsep *Smart City* pada pelayanan publik di kantor Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda yang menggunakan dua teori utama yaitu teori implementasi menurut George C Edwards III (1980) dalam Subarsono (2005:90) dan teori *Smart Governance* menurut Boyd Cohen dalam Rahmatullah (2021) yang berbeda dengan penelitian lainnya. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada lokus penelitian di kantor Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda yang belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya. Penerapan *Smart Governance* memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Penulis menemukan temuan penting yakni dalam pelaksanaan *Smart Governance* di berbagai daerah atau wilayah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat guna meningkatkan pelayanan publik. Sama halnya dengan temuan Rahmaniari (2021) bahwa penerapan *Smart Governance* didukung dengan adanya berbagai inovasi dari pemerintah yang mendukung penerapannya seperti *call center 112*, *command center*, dan wifi gratis di setiap Kelurahan. Implementasi *Smart Governance* ini masih memiliki beberapa kekurangan diantaranya sumber daya Manusia (SDM) yang kurang memadai, layaknya temuan dari Seftyana et al. (2022) pada penelitiannya proses implementasi *Smart Governance* untuk menciptakan layanan publik yang telah terintegrasi belum berjalan maksimal yaitu layanan pengaduan masyarakat berbasis online yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam memberikan aspirasi masih terdapat kekurangan pada pelaksanaannya yaitu sumber daya manusia atau operator pelaksana yang belum memadai. Berkaitan dengan sumber daya manusia yang perlu diperbaiki, Karmita (2022) juga menemukan dalam penelitiannya bahwa dalam penerapan *Smart Governance* perlu ada perbaikan terhadap sumber daya manusia dan pengenalan lebih luas kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian oleh Affandi et al. (2023) tentang analisis *Smart Governance* dalam rangka meningkatkan pelayanan publik ditemukan bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan *Smart Governance*. Hal ini sama dengan yang penulis temukan dalam penelitian ini yaitu masyarakat sebagai pendukung dalam implementasi kebijakan terutama pada penerapan *Smart Governance*.

Adanya *Smart Governance* juga diharapkan secara jangka panjang dapat meningkatkan pelayanan publik diberbagai daerah maupun wilayah di Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mendapatkan pelayanan dengan memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaannya sebagai tolak ukur apakah daerah tersebut siap untuk pelaksanaan *Smart Governance* layaknya penelitian oleh Triyanto et al. (2024) yang menganalisis penerapan *Smart Governance* di Kota Semarang.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penyelenggaraan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Blitar secara umum telah berjalan dengan cukup baik, namun ada beberapa hal yang menjadikan penyelenggaraan tata kelola kolaboratif tersebut belum optimal. Hal tersebut dinilai dengan menggunakan teori *collaborative governance* oleh

(Ansel & Gash, 2007) yang memiliki empat dimensi yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan suatu tata kelola kolaboratif. Keempat dimensi tersebut adalah kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan yang fasilitatif, serta proses kolaborasi. Fenomena yang penulis temukan terkait empat dimensi tersebut secara keseluruhan telah berjalan cukup baik namun masih ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya optimal seperti belum adanya insentif yang diberikan kepada *stakeholder* lain, kurang baiknya komunikasi antar *stakeholder*, serta belum adanya regulasi atau peraturan yang dapat digunakan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan tata kelola kolaboratif.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian hanya ini dilakukan dengan mengambil sampel di tiap-tiap *stakeholder* saja, seperti di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, Kantor Desa Semen, rumah Pak Muryani selaku pihak swasta, dan bank sampah aktif di Kabupaten Blitar.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penyelenggaraan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua orang tua penulis yang sepenuh kasih mendukung penulis dengan seluruh cintanya, keluarga, dan juga adik tercinta. Kepada Bapak Dosen Pembimbing, Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si dan seluruh sahabat yang mendukung penulis dengan doa-doa yang melangit sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulai, I. A., Fuseini, M. N., & File, D. J. M. B. (2024). Making Cities Clean With Collaborative Governance Of Solid Waste Infrastructure In Ghana. *Cleaner Waste Systems*, 8(May), 100150. <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2024.100150>
- Adianto, A., & Prayuda, R. (2018). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Lingkungan (Studi Kasus Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Good Governance*, 14(2), 185–198. <https://doi.org/10.32834/jgg.v14i2.18>
- Affandi, A., Nawawi, J., & Syamsu, S. (2023). Analisis Smart Governance Di Kota Makassar. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 285–303. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i2.10833>
- Ahdiat, A. (2023). *10 Negara Penghasil Sampah Terbesar Di Dunia, Ada Indonesia*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/7170ed19b57223c/10-negara-penghasil-sampah-terbesar-di-dunia-ada-indonesia>
- Anjani, R. (2022). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Kota Bekasi Jawa Barat*. <http://eprints.ipdn.ac.id/17032/1/collaborative-governance-dalam-pengelolaan-sampah-melalui-program-bank-sampah-di-kota-bekasi-provinsi-jawa-barat.pdf>
- Ansel, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance In Theory And Practice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Daka, M. (2020). Collaborative Governance And Community Participation In Solid Waste Management In Lusaka. *African Journal Of Governance And Development*, 9(2), 524–542.

- [https://www.researchgate.net/publication/347948716\\_collaborative\\_governance\\_and\\_community\\_participation\\_in\\_solid\\_waste\\_management\\_in\\_lusaka](https://www.researchgate.net/publication/347948716_collaborative_governance_and_community_participation_in_solid_waste_management_in_lusaka)
- Emerson, K., & Nabachi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. George Town University Press.  
[https://books.google.co.id/books?id=Ce5gcwaaqbaj&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Ce5gcwaaqbaj&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)
- Handoko, T., Syofian, ., & Tinov, M. . T. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (Das) Siak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 102.  
<https://doi.org/10.52239/jar.v6i3.1904>
- Hastuti, B., Anwar, F., & Darmi, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i2.70>
- Karmita, R. A. (2022). Penerapan Smart Governance Dalam Pengembangan Konsep Smart City Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.  
[http://eprints.ipdn.ac.id/15477/1/RIKA\\_ACIH\\_KARMITA\\_30.0581\\_PENERAPAN\\_SMART\\_GOVERNANCE\\_DALAM\\_PERKEMBANGAN\\_KONSEP\\_SMART\\_CITY\\_PADA\\_DINAS\\_KOMUNIKASI\\_DAN\\_INFORMATIKA\\_KOTA\\_BOGOR\\_PROVINSI\\_JAWA\\_BARAT.Pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/15477/1/RIKA_ACIH_KARMITA_30.0581_PENERAPAN_SMART_GOVERNANCE_DALAM_PERKEMBANGAN_KONSEP_SMART_CITY_PADA_DINAS_KOMUNIKASI_DAN_INFORMATIKA_KOTA_BOGOR_PROVINSI_JAWA_BARAT.Pdf)
- Labolo, M. (2017). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya* (Eighth). PT Rajagrafindo Persada.
- Mulyadi, M. (2019). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128–138.  
<https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Rahmaniar, T. (2021). Implementasi Smart Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara. *Ipdn*, 1999, 1–10.  
[http://eprints.ipdn.ac.id/8995/1/THIERSA\\_RAHMANIAR\\_29.1534\\_IMPLEMENTASI\\_SMART\\_GOVERNANCE\\_DALAM\\_MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA.Pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/8995/1/THIERSA_RAHMANIAR_29.1534_IMPLEMENTASI_SMART_GOVERNANCE_DALAM_MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA.Pdf)
- Reno, J. (2015). Waste And Waste Management. *Annual Review Of Anthropology*, 44(1), 557–572. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102214-014146>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.  
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Safitri, S. D., Abidin, A. Z., Negara, J. A., Administrasi, F. I., Malang, U. I., & Mt, J. (2021). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH ( Studi Pada Bank Sampah Sejahtera Desa Kalimo ' Ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ) Haryono No . 193 , Dinoyo , Kec . Lowokwaru , Kota Malang , 65144 , Indonesia Pendahuluan*. 15(5), 52–57.  
<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/SNAPP/article/view/1755/1261>
- Sapitri, R. (2016). Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Listrik Negara Area Pekanbaru. *JOM Fisip*, 3(2), 1–9.  
<https://media.neliti.com/media/publications/125140-ID-Pengaruh-Komitmen-Organisasi-Terhadap-Ki.Pdf>
- Seftyana, S., Idami, Z., & Afrijal. (2022). IMPLEMENTASI SMART GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN LAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI DI KOTA BANDA ACEH. *Academia.Edu*, 7(November), 1–4.  
<https://jim.usk.ac.id/fisip/article/view/22081>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

- Soegiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sulaiman, C. (2024). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN MASALAH SAMPAH DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH. *Eprints.Ipdn.Ac.Id*. [Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/17105/1/Muhammad Candra Sulaiman\\_31.0865\\_COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN MASALAH SAMPAH DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH.Pdf](http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/17105/1/Muhammad_Candra_Sulaiman_31.0865_COLLABORATIVE_GOVERNANCE_DALAM_PENANGANAN_MASALAH_SAMPAH_DI_KOTA_PALU_PROVINSI_SULAWESI_TENGAH.Pdf)
- Triyanto, D., Kismartini, Purnaweni, H., & Luqman, Y. (2024). Analisis Penerapan Smart Governance Di Kota Semarang. *Perspektif*, 13(2), 466–477. [Https://Doi.Org/10.31289/Perspektif.V13i2.10817](https://doi.org/10.31289/Perspektif.V13i2.10817)
- Ulfaida, L., Fauzi, L., & Kushartono, T. (2024). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR ANTRI KOTA CIMAH. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*. [Https://Sinta.Kemdikbud.Go.Id/Authors/Profile/6757252/?View=Googlescholar](https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6757252/?view=googlescholar)

